

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Garalka dan Darmanah. 2019. *Metode Penelitian*. CV. Hira Tech. Lampung.
- Harrys Pratama Teguh. 2019. *Hukum & Peradilan Konsitusi Indonesia Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*. Pustaka Referensi. Yogyakarta.
- H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Isharyanto dan Aryokko Abdurrachman. 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Halaman Moeka Publishing. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.

- Mohammad Mahrus Ali. 2019. *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Muhammad Junaidi. 2018. *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim. 2020. *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Wiryanto. 2019. *Etika Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media. Bandung.
- Yuzuru Shimada. 2020. *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.

JURNAL

- AD. Basniwati. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Jurnal IUS. Vol. II Nomor 5 Agustus 2014..

- Bambang Sutiyoso. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan". Jurnal Hukum. Vol. 15 Nomor 3 Juli 2008.
- Dachran Busthami. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia". Masalah - Masalah Hukum. jilid 46 Nomor 4 Oktober 2017.
- Eman Suparman. "Mahkamah Agung Dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal". Hukum dan Pembangunan. Nomor 3 Tahun XXX Juli – September 2000.
- Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". Vol. 17 Nomor 2 Mei 2019.
- Kariadi Kariadi. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok"". Justisi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol. 6, Nomor 2 2020.
- May Lim Charity. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Keteatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 Nomor 01 Maret 2016.
- Mohammad Mahrus Ali. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Konstitusi. Vol. 12 Nomor 1 Maret 2015.

- Nanang Sri Darmadi. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal HukumXXVI. Nomor 2 Agustus 2011.
- Nurul Qamar. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah konstitusi". Jurnal Konstitusi. Vol. I Nomor 1 november 2012.
- Rusnan. "Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal UIS. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. I Nomor 1 April 2013.
- Siedmy Lengkong. "Kajina Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Lex Administratum. Vol. III Nomor 6 Agustus 2015.
- Sofyan Sitompul. "Hak Uji Materiil (Menurut Amandemen UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 1 Nomor 3 November 2004.
- Sudarsono. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah undang-Undang Oleh Mahkamah Agung". Mimbar Yustitia. Vol. 1 Nomor 2 Desember 2017.
- Supriyadi. "*Community Of Pracitiones* : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan". Lentera Pusaka. Vol. 2 Nomor 2 2016.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

Pengujian Undang-Undang (studi Putusan Tahun 2003-2012)".
jurnal Konstitusi. Vol. 10 Nomor 4 Desember 2013.

Virto Silaban dan Kosariza. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Limbago : Journal of Constitutional Law. Vol. 1 Nomor 1 2021.

Zaki Ulya. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 133 Nomor 02 Juni 2016

SKRIPSI

Arfandi Ahmad Permana. 2019. "*Analisis Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*". Skripsi. Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dini Fajar Hidayah. 2021. "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ampel.

Gustianingsih. 2010. *Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengambilan Sumpah Bagi Para Calon Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Suatu*

Studi Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Hutomo Mandala Puta. 2021. *Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)*. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Muhammad Arya Fita Ramadhana. 2021. *“Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember.

Muldiana. 2013. *“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Kkonstitusis Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hsanuddin.

Tuti Hardiyati. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secar Terbuka Di Kota Makassar”*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

MAKALAH/LAINNYA

Janedjri M. Gaffar. 2009. Makalah: *“Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*. Surakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V.

Laporan Tahunan 2020 PT Pertamina (Persero). Lihat juga

<https://pep.pertamina.com/Annual>

Laporan Tahunan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Lihat

juga <https://bri.co.id/repodt>

Tulisan Hukum-Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi. “Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja”.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/ Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/Pmk.02/2015

Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000

Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 2620/UN4.5.3/PT.00/2022

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 18 Maret 2022

Kepada
Yth : HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
di,
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

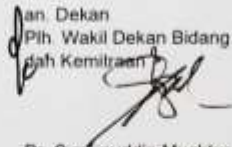
Nama	SONIA SEKAR SARI
No. Pokok	B011181071
No. HP	085395670809
Prog. Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Tata Negara
Alamat	Pammase
Pembimbing	1. Prof. Dr. Aminuddin Ilimar, S.H., M.H. 2. Eka Merdekawati Djafar, SH, MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

EKPLISIT LARANGAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN MENURUT PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 80/PUU-XVII/2019

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Dian Dekan
Pilih Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan


Dr. Syamsuddin Muchtar, SH, MH
NIP. 19631024 198903 1 002

Tembusan

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp - (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor 4228/UN4 5.3/PT.00/2022

Makassar, 30 Mei 2022

Lampiran -

Hal PENELITIAN

Kepada
Yth. MAHKAMAH KONSTITUSI
di,
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama	SONIA SEKAR SARI
No. Pokok	B011181071
No. HP	085395670809
Prog. Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Tata Negara
Alamat	Pammase
Pembimbing	1. Prof. Dr. Aminuddin Iimar, S.H., M.H. 2. Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



an: Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kerjasama

Dr. Muh. Hajarul, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19810918 200212 1 004

Tembusan

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

SURAT KETERANGAN

512/PP.00/05/2022

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama Kumiasih Panti Rahayu
NIP 19670530 199703 2 001
Jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sonia Sekar Sari
NIM B011181071
Status Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Sesuai dengan surat nomor 2620/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal ijin penelitian, mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dan pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Mei 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kumiasih Panti Rahayu



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kumiasih Panti Rahayu - NIP 19670530 199703 2 001
Digital Signature
mk113383191220530102456

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id